

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari pelaksanaan diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia dari era kemerdekaan hingga sekarang telah mengalami banyak sekali perubahan. Menurut White, Politik luar negeri mengalami dua tahapan dalam prosesnya, yaitu pada tataran pembuatan dan implementasi kebijakan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen dimana keputusan atau kebijakan diimplementasikan.¹ Dalam pengertian secara luas, diplomasi tidak hanya menyangkut pada tataran implementasi, tapi juga proses pembuatan kebijakan suatu negara.

Hal ini terkait dengan fungsi dari diplomasi yang menyangkut pada pengumpulan informasi, pemberian saran terhadap kebijakan, perwakilan, negosiasi, dan jasa-jasa konsuler.² Menurut Emilia, diplomasi publik merupakan bagian dari aktivitas politik internasional suatu negara, sekaligus merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan lobi politik internasional bagi suatu negara yang bertujuan dalam mencapai kepentingan nasional.³ Menurut Indrawati dan Nugroho, Indonesia telah menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal kemerdekaan. Konsep luar negeri bebas aktif tersebut masih diterapkan hingga saat ini. Pada dasarnya, prinsip politik luar negeri

¹ Brian White. Diplomacy. dalam John Baylis dan Steve Smith (ed). *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press. hal. 257.1997.

² Ibid

³Ranny Emilia.Praktek Diplomasi. Jakarta: Baduose Media.h.5.2013

“Bebas, Aktif” ini tidak banyak mengalami perubahan ditengah perubahan pemimpin di Indonesia.⁴

Pada masa awal kemerdekaan, prinsip “Bebas-Aktif” ini digambarkan dengan istilah “mendayung diantara dua karang” seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta pada situasi perang dingin. Di era reformasi, terutama pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, prinsip “Bebas-Aktif” digambarkan dengan istilah “Navigating in the Turbulance Ocean” serta “Thousand Friends Zero Enemy” pada periode kedua.⁵ Istilah ini sesuai dengan pembentukan citra Indonesia sebagai negara yang cenderung menghindari konflik sesuai dengan jargon “Thousand Friends Zero Enemy”. Prinsip tersebut juga merupakan suatu proyeksi bagi kekuatan *soft power* Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional sehingga dapat membangun kerjasama yang konstruktif dalam menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan.⁶

Berkaitan dengan adanya prinsip tersebut, pemerintahan SBY juga telah berhasil membentuk citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdaulat kepada publik Internasional melalui diplomasi publik. Menurut Emmerson, keberadaan dari Bali Democracy Forum menjadi ujung tombak penting dalam

⁴ Indrawati dan Agung Yudhistira Nugroho. Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Verity)*, 10(20):14–26.2018. hal. 15

⁵ Ibid

⁶ Tonny Dian Effendi, “Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku,” *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017): 77-81.2017.

politik luar negeri Indonesia serta pembentukan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.⁷

Selain itu, apresiasi dan peranan Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus aktor yang berperan dalam perdamaian internasional, diungkapkan oleh ratu Elizabeth pada saat kunjungan SBY di Inggris 31 Oktober 2012. Ia menyatakan:

*“Under your leadership Mr. President, Indonesia has performed a remarkable transformation. It is now a thriving democracy and one of the world fastest growing economy. Which is playing a greater role in international stage. [...] We share some common values. [...] For example you have shown regional leadership, in spreading the values of Indonesian vibrant democracy through Bali Democracy Forum. I congratulate you in this increasingly influential event.”*⁸

Di era Yudhoyono, melalui forum ini, telah membuat kiprah Indonesia di dunia internasional meningkat. Keaktifan Indonesia dalam politik internasional tentu tidak bisa diabaikan. Bali Democracy Forum I-VII pada tahun 2008-2014 menunjukkan sejumlah indikasi menjadi *soft diplomacy* Indonesia dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, berdasarkan pada pendapat Srivastava bahwa kesadaran dan keinginan negara secara umum melakukan usaha menciptakan perdamaian dapat digolongkan kepada aktivitas *soft diplomacy*.⁹

⁷ Donald K. Emmerson *Is Indonesia Rising? It Depends*. Dalam: Reid, A. (ed), *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. 2012. Singapura : Institute of Southeast Asian Studies. hal. 59.

⁸ Anon. Speech by The Queen at The Indonesian State Banquet, 2012. Dalam <https://www.royal.uk/queens-speech-indonesian-state-banquet-31-october-2012?page=13> [diakses 10 Maret 2021], 2012.

⁹ Viviek Kumar Srivastava. 2013. Soft Power and Soft Diplomacy: Nature, Comparison and Impact. Paper presented for 7th Annual NNC conference and PhD Course the Power of Knowledge: Asia and the West 4-8 November 2013 University of Southern Denmark, Campus Sønderborg, Denmark

Latar belakang dari terbentuknya forum ini, menurut menteri luar negeri Indonesia di era pemerintahan SBY, Hasan Wirajuda menulis artikel dengan judul *The Bali Democracy Forum: Setting A New Strategic Agenda For Asia*, akan pentingnya demokrasi bagi negara-negara di Asia, hal tersebut dikarenakan Asia merupakan suatu kawasan yang sangat dinamis.¹⁰ Permasalahan dalam lingkup keamanan manusia seperti kemiskinan, degradasi lingkungan dan wabah penyakit masih sering terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, Asia butuh untuk mengintensifkan kerjasama ekonomi dan juga mencapai kerjasama politik dan keamanan agar stabil, terutama mengenai demokrasi.¹¹ Forum ini merupakan salah satu langkah penting bagi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam *Tabloid Diplomasi*, Bali Democracy Forum (BDF) yang diinisiasi oleh Indonesia pada 2008, merupakan forum tahunan antar pemerintah yang inklusif dan terbuka mengenai perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.¹² Forum ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialogue-based, mengenai berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pengertian, serta berbagi pemikiran dengan negara-negara peserta.¹³

¹⁰ N. Hasan Wirajuda *The Bali Democracy Forum: Setting A New Strategic Agenda For Asia, Southeast Asia Bulletin*. Center for Strategic and International Studies (CSIS): International Security Program. Juni 2009.

¹¹ Ibid

¹² Kementerian Luar Negeri. Bali Democracy Forum, *Tabloid Diplomasi*. dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/bali-democracy-forum/> Dipublikasikan pada 22 Mei 2018.[Diakses 7 Maret 2021].2018.

¹³ Ibid

Dalam pandangan Indonesia, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum yang sukses. Demokrasi perlu dikonsolidasikan dan berakar pada setiap aspek kehidupan nasional Indonesia. Menurut Fatana Temory, Bali Democracy Forum ini adalah forum antar pemerintah tahunan yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai negara untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang praktik terbaik dari perdamaian dan demokrasi.¹⁴ Setiap tahun, Bali Democracy Forum ini mengedepankan dimensi demokrasi yang berbeda. Kegiatan Bali Democracy Forum ini telah diadakan sepanjang tahun dengan negara-negara Asia Pasifik yakni Mesir, Tunisia, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan Fiji untuk mempromosikan dan membina kerjasama regional dan internasional secara berkelanjutan.¹⁵

Sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan forum ini Bali Democracy Forum juga membentuk Institute for Peace and Democracy (IPD). Institusi ini didirikan untuk mendukung dan membekali para pemimpin yang ingin menerapkan perdamaian dan demokrasi di negaranya. IPD juga merupakan pembuat dan pelaksana dari Bali Democracy Forum.¹⁶ Memasuki awal pemerintahan presiden Joko Widodo tahun 2015. Mengutip dari Tempo, Hikmahanto Juwana menilai bahwa penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) VIII pada tahun 2015 masih perlu dievaluasi. Hal tersebut dikarenakan,

¹⁴ Fatana Temory. *Democracy Promotion*, dalam *Public Diplomacy in Indonesia: Reflections for Progress*. Diterbitkan oleh USC Center on Public Diplomacy (CPD) [pdf]. Dalam <https://flipflashpages.uniflip.com/2/100921/351336/pub/document.pdf>. Mei 2015. [diakses 8 Maret 2021],2015. Hal.9.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

penyelenggaraan BDF tahun itu tak lagi dihadiri para kepala negara maupun Menteri Luar Negeri dari negara-negara sahabat di kawasan.¹⁷

Bali Democracy Forum VIII diselenggarakan 11 Desember 2015. Forum ini dihadiri oleh 89 negara perwakilan dan tiga organisasi internasional. Menurut Menlu Indonesia, Retno Marsudi, absennya para delegasi yang representatif di BDF disebabkan oleh padatnya agenda-agenda internasional, seperti Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Prancis, yang masih berlangsung.¹⁸ Mengenai Bali Democracy Forum, bagi Politik Luar Negeri Indonesia, mengingat di masa pemerintahan SBY forum ini menjadi arena penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia, yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4.

Di akhir periode pemerintahannya, SBY mengaku akan menyampaikan kepada penggantinya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk melanjutkan keberlanjutan forum ini. Ia juga menggarisbawahi Forum Media Bali yang diselenggarakan dalam rangkaian BDF sebagai suatu ajang tukar pikiran yang bermanfaat bagi media.¹⁹ Presiden SBY saat itu juga menyampaikan bagaimana dialog media di masa lampau telah berhasil menjembatani media dalam solusi krisis kartun Nabi Muhammad.²⁰

¹⁷ Tempo.co. Perlu Evaluasi, Bali Democracy Forum Tak Dihadiri Presiden. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/727122/perlu-evaluasi-bali-democracy-forum-tak-dihadiri-presiden/full&view=ok>. 11 Desember 2015. [diakses 7 Maret 2021].2015.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Kompas. SBY Akan Minta Jokowi Lanjutkan Bali Democracy Forum. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/10/11515011/SBY.Akan.Minta.Jokowi.Lanjutkan.Bali.Democracy.Forum> [diakses 8 Maret 2021].2014.

²⁰ Ibid

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis mengajukan rumusan masalah, Bagaimana implementasi Bali Democracy Forum sebagai bentuk dari diplomasi publik Indonesia pada tahun 2008-2020?

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bali Democracy Forum sebagai hal penting bagi diplomasi publik dalam pergaulan internasional terutama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Pembahasan pada penelitian ini dimulai pada tahun 2008 hingga 2020 dikarenakan hingga saat ini pelaksanaan BDF masih berlangsung.

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan sebuah sumbangsih dalam kajian Hubungan Internasional di bidang diplomasi publik dan Politik Luar Negeri Indonesia dalam bentuk penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Sedangkan secara khusus, memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Diplomasi Publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pada periode pertama, berupa penjelasan mengenai pelaksanaan dan implementasinya.

Mengenai manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan bagi akademisi maupun praktisi mengenai diplomasi publik Indonesia melalui Bali Democracy Forum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Diplomasi Publik

Halvard Leira menganggap bahwa praktik diplomasi tradisional berkaitan dengan intrik politik internasional (fokus untuk kekuasaan) dengan kata lain bersifat *high politics* sedangkan pendekatan baru atau diplomasi publik berfokus pada perdagangan atau isu yang berkaitan dengan *low politics* seperti ekonomi, lingkungan maupun budaya.²¹ Pengertian dari diplomasi publik, menurut Nicholas J. Cull, merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh aktor internasional untuk mengelola lingkungan internasional melalui interaksi dengan publik internasional.²²

Manheim menambahkan bahwa diplomasi publik juga dikenal sebagai sebuah instrumen politik. Diplomasi publik ini digunakan oleh suatu negara dalam mengelola hubungannya dengan aktor negara dan non negara untuk memahami

²¹ Halvard Leira. *A Conceptual History of Diplomacy*, dalam Costas M. Constantinou, Pauline Kerr dan Paul Sharp (eds) *The SAGE Handbook of Diplomacy*. London: Sage Publications Ltd. hal.34.2016.

²² Nicholas J. Cull. *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. California: Figueroa Press. h.17.2009

budaya, perilaku dan mempengaruhi opini publik internasional dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.²³ Sedangkan Citra Hennida berpendapat bahwa diplomasi publik muncul sebagai alternatif instrumen politik luar negeri yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas *power* terbatas seperti halnya Indonesia.²⁴

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, sebagai aktor penting dalam pelaksanaan diplomasi publik, pelaksanaan BDF sejak era presiden Susilo Bambang Yudhoyono melibatkan negara-negara yang masih dalam taraf memulai menerapkan prinsip demokrasi maupun negara-negara yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi meskipun negara tersebut dianggap masih belum demokratis.²⁵

Selanjutnya, penulis menjabarkan secara lebih rinci mengenai bagaimana mengidentifikasi dari pelaksanaan diplomasi publik dari Bali Democracy Forum. Karolina Zielińska mengelompokkan menjadi 8 kategori. Yaitu diplomasi pendidikan (*educational diplomacy*), diplomasi warga (*citizen diplomacy*), diplomasi digital (*digital diplomacy*), diplomasi sejarah (*historical diplomacy*), diplomasi sosial (*Social diplomacy*) dan diplomasi pembangunan (*development*

²³ Jarol B. Manheim. *Strategic Public Diplomacy & American Foreign Policy: The Evolution of Influence*. New York: Oxford University Press. 1994.

²⁴ Citra Hennida. Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXII. No. 1, Januari–Maret 2009, 17–23. hal. 23. 2009.

²⁵ Yolla Anggraeni dan Indrawati. Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum Sebagai Bagian dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. *Global Insight Journal* Vol 05, No. 01 Oktober - Maret 2020. hal. 46. 2020.

diplomacy).²⁶ Pada pengelompokan tersebut, penulis mengkategorikan Bali Democracy Forum ini termasuk dalam spektrum diplomasi pembangunan. Konsep diplomasi pembangunan berada dalam payung diplomasi publik, karena upaya tersebut dirumuskan langsung oleh negara pendonor untuk menjangkau target masyarakat di negara lain. Selain itu, diplomasi pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan membangun citra positif di luar negeri, berupa menjalin hubungan bilateral maupun multilateral, dengan tujuan mengambil peran serta posisi internasional berdasarkan transfer bantuan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara-negara berkembang.²⁷ Diplomasi pembangunan dapat dilegitimiasi sebagai bagian dari diplomasi baru (*new diplomacy*) karena memiliki kesamaan dalam satu atau lebih ciri khas “diplomasi publik baru”, seperti praktiknya yang dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga entitas non-negara; didasarkan pada penggunaan *soft power*, komunikasi dua arah, manajemen informasi yang kredibel; dan berorientasi jangka panjang dan jangka pendek.²⁸

Lebih lanjut, menurut Zielińska pada praktik diplomasi pembangunan seringkali departemen luar negeri atau kementerian luar negeri bertugas dalam program bantuan luar negeri (termasuk “diplomasi pembangunan”, yang dipahami sebagai partisipan dalam forum global) seringkali dibantu oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. dari program bantuan. Departemen-

²⁶ Karolina Zielińska. *Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations*. *Historia i Polityka* No.16 (23)/2016, hal 9-26.2016.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

departemen yang bertanggung jawab atas diplomasi publik biasanya berkonsentrasi pada kampanye komunikasi dan branding ketika melakukan diplomasi.²⁹

Contoh konkrit dari hal ini yaitu pada negara Amerika Serikat, seorang Sekretaris Negara yang terpisah secara langsung mengawasi United States Agency for International Development (USAID), sementara Wakil Sekretaris untuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik mengepalai bagian untuk Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Program Informasi Internasional dan Urusan Publik mempopulerkan bantuan pembangunan secara langsung disebutkan dalam mandat Wakil Sekretaris.³⁰ Sedangkan di Islandia, kementerian luar negeri menjadi aktor pelaksana utama dengan menjunjung tinggi terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, keragaman, toleransi, keadilan, dan solidaritas dalam pelaksanaan diplomasi publik.³¹

1.4.1.2 Nilai Demokrasi

Menurut Anak Agung Banyu Perwita, demokrasi di era modern mulai menjadi perhatian utama bagi negara-negara dunia ketiga. Hal ini terjadi karena tuntutan global akan penyebaran demokrasi, perlindungan hak asasi manusia,

²⁹ Ibid

³⁰ U.S.Department of State. *Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affair* [daring]. dalam <https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-affairs/>. [diakses 30 Juni 2021].t.t.

³¹ Icelandic Ministry of Foreign Affairs. *About Ministry of Foreign Affairs* [daring]. <https://www.government.is/ministries/ministry-for-foreign-affairs/about-the-ministry/>. [diakses 30 Juni 2021].t.t.

penurunan kapasitas lingkungan, dan penyelesaian konflik komunal.³² Semenjak berakhirnya perang dingin, isu non-tradisional terutama demokrasi menjadi isu penting dalam lingkup hubungan internasional. Beberapa negara menggunakan demokrasi beserta diplomasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional. Negara-negara dunia ketiga yang belum memiliki kekuatan tradisional dalam politik internasional cenderung menggunakan demokrasi sebagai sistem pendukung kekuatan politik dan ekonomi di dunia internasional.³³

Nye menganggap mempromosikan nilai-nilai demokrasi dengan cara menghargai hak asasi manusia dan penerapan pasar terbuka merupakan langkah penting bagi negara dalam menggunakan *soft power* mereka di ranah diplomasi publik. Selain itu, Nye juga menggarisbawahi bahwa tindakan yang melibatkan komunikasi dua sisi lebih efektif sebagai bagian dari upaya diplomasi publik daripada yang bersifat pesan sepihak. Pengamatan ini dapat diekstrapolasi untuk mencerminkan efektivitas berbagai jenis bantuan (misalnya transfer keuangan vs transfer pengetahuan) dalam konteks *soft power* dan diplomasi publik.³⁴

Francis Fukuyama, seorang internasionalis liberal, mengemukakan dalam karya monumental “The End of History and The Last Man” bahwa untuk menciptakan perdamaian dunia, Amerika Serikat memiliki kepentingan jangka

³² Anak Agung Banyu Perwita. Penegakan HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2006, Volume 24 No.2.hal. 112-120. 2006.

³³ Wilyan Lie dan Muhnizar Siagian. *Indonesia Interests in Bali Democracy Forum (BDF). Proceedings of the 5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)*. Atlantis Press. hal. 49-54.2018. hal.49.

³⁴ Joseph Nye jr.. *Soft Power*. USA : Public Affairs. 2004.

panjang dalam menyebarkan ideologi demokrasi ke seluruh dunia.³⁵ Lynn-Jones juga berpendapat bahwa menyebarkan demokrasi di seluruh dunia membawa keuntungan bagi Amerika Serikat. Salah satu kepentingan paling strategis dari promosi demokrasi Amerika Serikat adalah memastikan keamanan nasional dari ancaman eksternal. Seperti upaya pencegahan serangan teroris dan dorongan aliansi politik antar negara demokrasi untuk saling mendukung satu sama lain.³⁶

Sejak era pemerintahan SBY, Indonesia lebih cenderung memposisikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional dengan melihat secara *outward looking* atau orientasi ke luar dalam pergaulan internasional. Menurut Evan Laksmana, demokrasi memberikan Indonesia kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan profil regional dan globalnya. Lebih lanjut, konsolidasi demokrasi Indonesia telah mendapatkan kembali reputasi Indonesia dalam urusan dunia berupa kekuatan *soft power*.³⁷ Agenda-agenda utama yang selalu dibahas dalam BDF adalah hubungan antara demokrasi, keamanan dan stabilitas. Mengambil pelajaran dari sejarah Indonesia, demokrasi merupakan jalan penting bagi sistem kehidupan nasional yang lebih baik dan terbuka.³⁸ Demokrasi harus dihadirkan untuk mendukung pemerintahan dan kemaslahatan

³⁵Francis Fukuyama. *The End of History and the Last Man*. New York : Free Press, A Division of Macmillan, Inc..1992.

³⁶Sean M. Lynn-Jones.1998 *Why the United States should spread democracy?* [daring]. dalam <https://www.belfercenter.org/publication/why-united-states-should-spread-democracy> [diakses 30 Juni 2021].

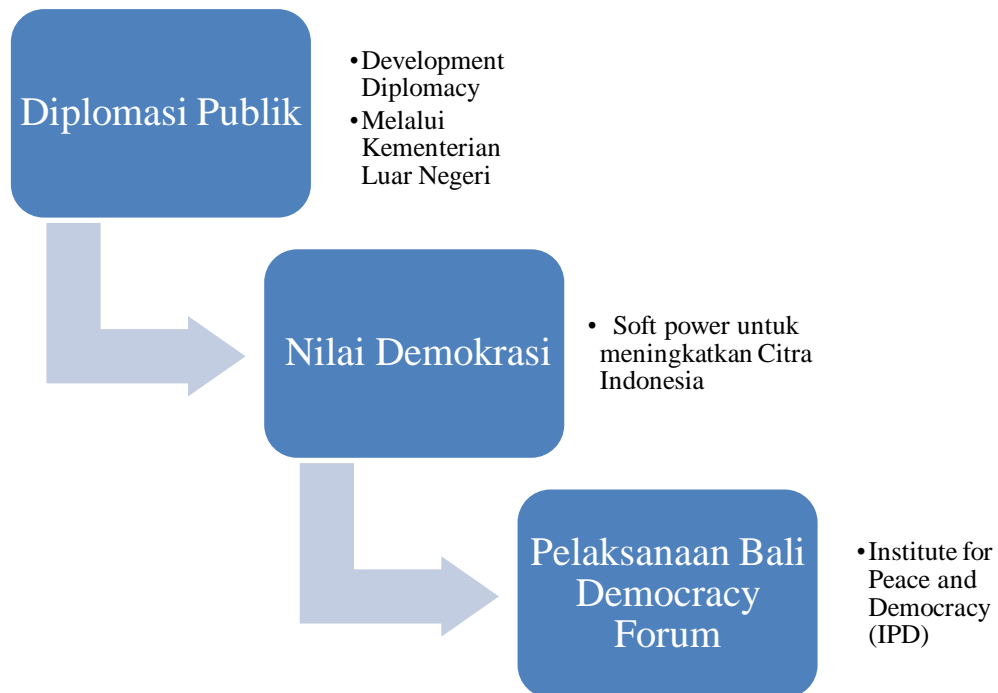
³⁷ Evan Laksmana. *Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?*. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 2 (Agustus 2011), hal. 157-182. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).2011.

³⁸ Wilyam Lie dan Muhnizar Siagian, loc.cit, hal. 52.

rakyat dan negara. Demokrasi harus bersatu, tidak terpisah dalam hal kerjasama untuk kemakmuran dan perdamaian yang dapat dicapai jika stabilitas tersedia.³⁹

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Dari skema diatas, menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) merupakan bentuk dari implementasi nyata diplomasi publik Indonesia yang menurut Zielińska dikelompokkan sebagai development diplomacy. Nilai demokrasi publik ini dimanfaatkan sebagai *soft power*. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia selalu dibantu oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forum setiap tahunnya.

³⁹ Ibid

1.6 Argumen Utama

Berlandaskan pada latar belakang masalah, landasan teori, serta sintesa pemikiran, maka peneliti memberikan argumen utama sebagai berikut. Argumen utama dalam penelitian ini yakni BDF merupakan forum yang digagas oleh Indonesia yang bertujuan untuk mengimplementasikan diplomasi publik Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai instrumen utama. BDF juga bertujuan untuk melibatkan negara-negara yang baru memulai menerapkan prinsip demokrasi dan juga bagi negara yang berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Hadirnya BDF sebagai diplomasi public Indonesia juga berguna untuk meningkatkan citra positif Indonesia dalam level regional maupun global, dengan cara mengedepankan nilai-nilai demokrasi sebagai soft power Indonesia.

Sejak masa pemerintahan SBY, BDF menjadi hal penting bagi Indonesia dalam pergaulan Internasional. Memasuki pemerintahan Joko Widodo, forum ini tetap diadakan dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia yang sesuai dengan amanat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat akan upaya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Implementasi dari diplomasi publik Indonesia tercipta dalam berjalannya Bali Democracy Forum, yang terlaksana setiap tahun selepas pemerintahan SBY.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, fenomena itu dapat berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁴⁰ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menerangkan secara deskriptif dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang semakin berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau dampak yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.

Menurut Silalahi, dalam penelitian deskriptif, teori berfungsi menjelaskan fenomena dilengkapi dengan data-data dan gambaran jelas mengenai fenomena yang terjadi. Kelengkapan data serta gambaran fenomena tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari studi literatur.⁴¹ Melalui tipe penelitian deskriptif, penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang diplomasi publik Indonesia yang diimplementasikan melalui Bali Democracy Forum yang sebelumnya telah diinisiasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada pemerintahan Joko Widodo selama dua periode.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan waktu. Jangkauan pada penelitian

⁴⁰ SukmaDinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2006.

⁴¹ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

ini mengambil rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2020, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Bali Democracy Forum yang bermula dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua tahun 2008 hingga 2014, berlanjut pada pemerintahan presiden Joko Widodo pada tahun 2015-2020 selama dua periode.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif.⁴² Metode kualitatif banyak menggunakan metode studi kasus, observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Dalam mengumpulkan data juga harus diperhatikan sumbernya.⁴³ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah literatur seperti laporan penelitian, jurnal penelitian, website, dan berbagai data yang didapatkan dari instansi terkait.⁴⁴

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam suatu penelitian, menurut Neuman metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif.⁴⁵ Metode analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan cara survei, eksperimen,

⁴² M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

⁴³ Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ W. Lawrence Neumann. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon. 2003.

ataupun non-eksperimen. Sedangkan metode analisis data kualitatif menggunakan penyertaan studi kasus, maupun observasi.⁴⁶

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling berhubungan merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisa.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor analisis data kualitatif lebih mengutamakan analisis data dari hasil observasi daripada menjelaskan detail dari peristiwa yang terjadi.⁴⁸ Pada penelitian ini data empiris yang digunakan adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka.⁴⁹ Sebab sumber data kualitatif yang digunakan peneliti adalah berupa studi literatur.⁵⁰

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UIP: Jakarta. 1992.

⁴⁸ Robert Bogdan dan Steven Taylor. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional. 1992.

⁴⁹ S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Karya. 2008.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2010

Bab I merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan garis besar pada penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konsep, sintesa pemikiran, argument utama, dan yang terakhir metodologi penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai sejarah dan asal usul dari terciptanya Bali Democracy Forum beserta agenda dan kepentingan Indonesia dalam setiap pelaksanaannya dari mulai tahun 2008 hingga 2020.

Bab III menjelaskan mengenai proses pembentukan nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai instrumen diplomasi publik dan implementasi dari diplomasi pembangunan (development diplomacy) dalam pelaksanaan Bali Democracy Forum. Serta menjelaskan mengenai Politik Luar Negeri Indonesia dan pandangan Bali Democracy Forum di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono dan Joko Widodo.

Bab IV kesimpulan dan saran